



Tamu Langsung Batalan Reservasi

■ Industri Perhotelan dan Restoran Kembali Terpukul Kebijakan Pembatasan Sosial

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di DIY pada 11-25 Januari dipastikan berdampak langsung pada industri perhotelan setempat.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, meski aturan tersebut lebih cenderung ke pembatasan bukan penutupan, namun tetap berdampak pada reservasi hotel. Hingga saat ini sudah banyak terjadi pembatalan pemesanan kamar.

"Sudah banyak *cancelan* sampai 30 persen, mulai dari tanggal 11 Januari. Tingkat reservasi hanya mencapai 10 persen untuk sektor tengah saja. Namun secara keseluruhan di DIY, hanya enam persen saja," jelasnya, Jumat (8/1).

Ia mengatakan bahwa pembatasan tersebut pun sudah dirasakan dampaknya. Tamu yang rencananya akan datang dan sudah reservasi, memilih menunda dulu. "Walaupun sudah punya surat lengkap, (*rapid test*) antigen, memilih menunda dulu," imbuhnya.

Padahal menurutnya, sebagian besar anggota PHRI DIY telah melakukan verifikasi protokol kesehatan bersama pemerintah daerah. Banyak juga yang telah melengkapi diri dengan sertifikasi CHSE yang meliputi unsur *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan) & *environment sustainability* (kelestarian lingkungan).

"Perhotelan di DIY sebagian besar sudah menjalani verifikasi proses oleh Pemkot, Pemkab, serta sertifikasi CHSE terutama anggota PHRI. Jadi kita berharap pembatasan ini tidak berdampak besar bagi perhotelan dan restoran," ha-

rapnya.

Adapun dalam Instruksi Gubernur DIY tentang PSTKM tersebut, seluruh destinasi wisata dan industri pariwisata maksimal beroperasi sampai pukul 19.00 dan kapasitas yang diizinkan hanya 50 persen. Namun demikian, Pemerintah DIY memberi pengecualian bagi industri perhotelan, yang dibolehkan tetap beroperasi hingga 24 jam. Sedangkan untuk restoran, kapasitas yang diperbolehkan hanya 25 persen, dan setelah pukul 19.00 hanya melayani *take away*.

Wakil Ketua bidang Pembinaan Restoran dan Hiburan, PHRI DIY, Aldi Fadhlil Diyanto mengatakan bahwa PHRI tidak ingin tercipta kluster dari restoran atau hotel, dan tetap berupaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan angka penularan Covid-19. Walaupun tak dipungkiri, aturan itu pasti akan berdampak pada pemasukan bisnis restoran dan kafe, di tengah geliat industri restoran yang membaik sejak November kemarin.

"Teman-teman melaporkan sudah mulai agak baik dan aturan ini pasti akan mempengaruhi. Tapi tidak apa-apa, karena ini peraturan pemerintah dengan melihat kondisi covid yang saat ini kasusnya meningkat," ujarnya.

Verifikasi

Restoran di Yogya, terutama anggota PHRI, menurutnya sudah menerapkan proses dan mengikuti standarisasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Selain itu, sudah ada verifikasi di lapangan bekerja sama dengan Pemkot dan Pemkab. Dari sekitar 300 pelaku usaha restoran yang bergabung ke PHRI, sekitar 70 per-

TERHANTAM LAGI

- Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di DIY pada 11-25 Januari langsung berdampak pada hotel dan restoran.

- Pembatalan reservasi sudah mencapai 30 persen sejauh ini, dimulai untuk pemesanan pada 11 Januari.

- Tamu memilih untuk menunda kedatangannya, meski sudah melengkapi diri dengan berbagai berkas kesehatan.

sennya diakui Ali sudah mendapatkan verifikasi penerapan proses.

"Verifikasi terus dilakukan, tak hanya bagi anggota PHRI saja namun juga yang di luar PHRI. Karena dengan verifikasi lapangan, pencegahan bisa lebih maksimal," paparnya.

Caroline Gabby, *Marketing Communications* Kalluna Restaurant, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait aturan tersebut dan langsung melakukan penyesuaian. Di antaranya dengan mengganti jam operasional. "Kapasitas dan jumlah kursi kami kurangi, serta memberikan jarak untuk *social distancing*," ujarnya.

Disinggung terkait kemungkinan dampak pembatasan ke pemasukan, ia tak menampiknya. "Tapi kami tetap akan mendukung peraturan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19. Sejak awal pun kami sudah menerapkan standar protokol kesehatan baik bagi pengunjung maupun internal kami," tandasnya. (nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005